

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPPD BANJARMASIN II DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

Rabiatul

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : _2000312320005 @ulm.ac.id

Rifqi Novriyandana

Email : rnovriyandana@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Kasyful Anwar

Email : kanwar@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The research was carried out with the aim of identifying the situation with the collection of motor vehicle tax (PKB) and motor vehicle transfer fee (BBNKB) that occurs by the UPPD of Banjarmasin II City, South Kalimantan. Apart from that, the research also aims to identify obstacles that arise in the process of collecting PKB and BBNKB and design an effective pattern to increase PKB and BBNKB income in the last three years by the Regional Tax and Levy Management Agency in the South Kalimantan region. An effective model in analyzing data is an exploratory approach through a qualitative data analysis approach. The findings from this research reveal that in 2020, there were PKB arrears of around IDR 59,000,000,000,-, while BBNKB revenues increased in 2021 and 2022 in the South Kalimantan province.

Keywords: Motor Vehicle Tax Collection, Motor Vehicle Title Transfer Fee, Local Revenue

ABSTRAK

Riset dilaksanakan dengan tujuan mengenali situasi pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terjadi oleh UPPD Kota Banjarmasin II, Kalimantan Selatan. Selain itu, riset juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam proses pemungutan PKB dan BBNKB dan merancang pola efektif guna meningkatkan penghasilan PKB dan BBNKB pada tiga tahun terakhir oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Model efektif dalam menganalisis data yaitu pendekatan eksploratif melalui pendekatan analisis data kualitatif. Temuan dari riset ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2020, terdapat tunggakan PKB sekitar Rp.59.000.000.000,-, sementara penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 di wilayah provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Lokal

PENDAHULUAN

Sebagai usaha menjalankan tugas *government* serta mewujudkan proyek-proyek pada berbagai wilayah di Indonesia, penerapan prinsip otonomi daerah menjadi fokus utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Konsep otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, serta tanggung jawab fungsional kedaerahan otonom agar mengelola serta merawat urusan *government* serta kebutuhan masyarakat lokal sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah diarahkan untuk mengurangi ketergantungan penuh daerah kepada pemerintah pusat.

Sebagai pendapatan yang memainkan peran krusial dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan tugas *government* dalam penghasilan PAD, dimana diantara komponennya berasal dari PAD. Terutama, pajak daerah seperti PKB/BBNKB, memiliki peran penting dalam mengisi PAD. Sumbangsih keduanya berdampak besar pada pemasukan keuangan di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian, administrasi dan pengelolaan PKB/BBNKB harus dikelola teliti, akurat, serta dengan penuh pertimbangan.

Penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki sistem pengawasan yang efisien guna memastikan bahwa kebijakan manajemen yang telah ditetapkan diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Upaya penyederhanaan dalam proses administratif juga menjadi langkah yang signifikan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Tujuan utama dari upaya penyederhanaan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan pemasukan daerah di masa mendatang.

Di bawah ini adalah gambaran dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2022:

Tabel 1 Data Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor

**Di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin
Tahun 2020-2022**

Tahun	Sepeda Motor	Mobil	Jumlah
2020	139.67		1
	2	35.882	75,554
2021	163.69		2
	3	40.079	03,718
2022	156.60		1
	0	29.829	68,429

Sumber: UPPD Banjarmasin II

Sebelumnya, telah dilakukan sebuah riset tentang analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor. Riset ini difokuskan pada evaluasi dampak dari variabel-variabel tertentu terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara lebih spesifik, penelitian ini menyelidiki relasi antara volume kendaraan bermotor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta jumlah personel yang terlibat dalam proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak yang tercatat.

Hasil dari riset ini mengindikasikan adanya hubungan positif dan bermakna antara volume kendaraan bermotor serta PDRB dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara sederhana, semakin besar jumlah kendaraan bermotor dan semakin tinggi PDRB di suatu wilayah, maka akan berdampak pada peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Tertaut pada peluang kendaraan yang telah diuraikan sebelumnya, UPPD II di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai entitas pelaksana yang dipercayakan untuk mengelola dan mengoordinasikan pemasukan pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber potensial pendapatan lokal, spesifik pada kerangka PAD.

Potensi kendaraan beroda dua serta beroda empat di Wilayah Kalimantan Selatan mendapatkan perkembangan positif setiap tahun. Mengobservasi situasi ini, diharapkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah melalui PKB/BBNKB akan mengalami peningkatan sesuai dengan tingkat penjualan kendaraan roda dua. Hal ini

disebabkan oleh peran krusial yang dimainkan oleh sumbangan PKB/BBNKB roda dua dalam memastikan tingkat kemampuan kedaerahan.

Secara pelaksanaan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB, terdapat sejumlah hambatan akan dihadapi agar memenuhi tujuan dan target yang telah ditetapkan UPPD II. Faktanya, realisasi pemungutan PKB/BBNKB belum secara keseluruhan mencapai 100%. Perincian mengenai hal ini dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
020	122.450.000.00 0	126.217.280.317
021	147.000.000.00 0	133.599.955.550
022	139.660.000.00 0	143.110.211.178

Sumber: UPPD Banjarmasin II

Dari data dalam tabel yang disajikan di atas, dapat diperhatikan bahwa dalam rentang tahun 2020 hingga 2022, terdapat realisasi Pendapatan Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum mencapai tingkat 100%. Situasi ini menimbulkan kepentingan yang signifikan dalam menganalisis Hal-hal yang menjadikan proses pemungutan PKB/BBNKB. Keadaan tersebut menghadirkan persoalan yang mengharuskan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengembangkan model efektif guna menumbuhkan penerimaan PKB/BBNKB, dengan tujuan untuk mencapai sasaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan.

Tertaut dengan hal tersebut, sangat menarik untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap efektivitas pemungutan PKB/BBNKB. Proses tersebut akan membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah terdeteksi, sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat merancang rencana yang

lebih efisien guna meningkatkan tingkat penerimaan PKB/BBNKB, dan akhirnya mewujudkan sasaran PAD yang telah ditentukan.

Riset ini bertujuan:

- 1) Melakukan analisis terhadap pendapatan dari PKB/BBNKB yang dikelola oleh lembaga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan.
- 2) Mengidentifikasi elemen-elemen yang berperan sebagai hambatan dalam upaya menumbuhkan pencapaian hasil PKB/BBNKB di wilayah Kalimantan Selatan.
- 3) Menelaah strategi atau tindakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Wilayah Kalimantan Selatan guna menumbuhkan pencapaian hasil PKB/BBNKB di area tersebut.

HASIL PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan di UPPD Kota Banjarmasin II, di wilayah Kalimantan Selatan. Selama periode 20 Maret 2023 hingga 28 Maret 2023, peneliti melakukan observasi lapangan yang bersifat singkat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sebenarnya di lapangan serta untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terungkap terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selama observasi ini, peneliti juga membuka peluang untuk menemukan topik-topik yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

Metode penelitian melibatkan pelaksanaan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan kunci. Wawancara ini berlangsung selama 30 hingga 90 menit dan bertujuan untuk memperoleh pandangan yang mendalam tentang berbagai aspek terkait PKB dan BBNKB. Kemudian, penelitian ini mencakup kegiatan pengarsipan terhadap segala berkas keuangan dan berkas non keuangan yang relevan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk menilai sejauh mana situasi dan kondisi di UPPD II sesuai hasil dialog dan wawancara yang diperoleh dari narasumber utama.

KESIMPULAN

Determinasi dari riset ini adalah:

- 1) Menetapkan Sasaran Penerimaan PKB serta BBNKB: Wilayah Kalimantan Selatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah lebih cenderung mengaplikasikan pendekatan *dari atas ke bawah* dalam merencanakan anggaran pendapatan untuk tahun-tahun mendatang. Pendekatan ini bersandar pada evaluasi hasil pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Kepatuhan terhadap Sistem dan Proses Pengumpulan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam konteks ini diwakili oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, secara terus-menerus mengikuti alur pengumpulan secara jelas dan telah ditetapkan. Tindakan ini mencerminkan ketaatan terhadap peraturan yang ada dalam administrasi PKB/BBNKB.

Hambatan-hambatan dalam proses pemungutan PKB/BBNKB:

1. Prilaku Wajib Pajak

- a. Kerusakan dan Kehilangan Kendaraan Roda Dua
- b. Lupa serta Kendala Ekonomi oleh Wajib Pajak
- c. Akses Mudah untuk Memperoleh Kendaraan Bermotor
- d. Ketiadaan Sanksi Pidana yang Tegas

2. Pengetahuan mengenai PKB/BBNKB masih terbatas. memiliki kelemahan dalam pemahaman mengenai fakta bahwa kontribusi dari PKB/BBNKB memainkan peran penting dalam menghasilkan PAD wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Fenomena tersebut berasal dari kurangnya usaha dalam penyuluhan dan kolaborasi *government* dengan pihak yang berkewajiban membayar pajak.

3. Pandemi *covid-19*

Pandemi yang muncul di Indonesia pada tahun 2020 telah menjadi suatu peristiwa yang tak terduga bagi seluruh masyarakat. Sebagai akibat dari hal tersebut, UPPD II mengungkapkan bahwa berbagai faktor telah menyebabkan penurunan dalam berbagai aspek ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi realisasi pendapatan yang turut mengalami penurunan.

Langkah-langkah dan strategi yang diambil oleh pemerintah, khususnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, termasuk:

- 1) Komunikasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui UPPD II, mengadopsi upaya komunikasi yang luas. Ini mencakup sosialisasi di berbagai sektor, termasuk melalui media massa, platform media sosial, dan bahkan melibatkan tempat-tempat ibadah.

2) Kolaborasi

UPPD II bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melaksanakan razia guna mengidentifikasi setiap pribadi yang belum/tidak membayar pajak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menemukan kendaraan yang hilang akibat kejahatan pencurian kendaraan (CURANMOR). Kerja sama ini membantu dalam mengumpulkan data dan menjangkau pelanggar-pelanggar pajak yang mungkin terlewatkan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran, dan kepatuhan, sekaligus mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

3) Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki peran krusial terhadap tantangan tersebut. Sejumlah keputusan, misalnya memberikan insentif pajak pada perseorangan, memiliki dampak penting dalam mengatasi hambatan. Oleh karena itu, UPPD II secara berkelanjutan melakukan proses pendataan untuk mengakui kondisi dan posisi kendaraan.

4) Layanan

Pelayanan yang efisien memiliki peranan yang sangat vital untuk menunjang dalam proses pembayaran pajak. Karena setiap orang cenderung menghindari kerumitan/kesulitan dalam membayar pajak, UPPD II telah meningkatkan penyediaan layanan mereka untuk memaksimalkan proses pemungutan pajak.

Rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- 1) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai PKB dan BBNKB oleh UPPD II di Kota Banjarmasin, Wilayah Kalimantan Selatan, disarankan untuk mengundang para pemangku kepentingan terkait, termasuk melibatkan kalangan akademisi terutama yang memiliki latar belakang ekonom dan akuntan. Karena menetapkan tarif PKB dan BBNKB jika kendaraan dimiliki lebih dari satu, memiliki keterkaitan erat pada ekonomi masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, adanya partisipasi dari kalangan akademisi akan membantu dalam menghasilkan prediksi-prediksi yang lebih akurat terhadap minat masyarakat serta kesanggupan mereka dalam retribusi pajak yang bersifat progresif di masa mendatang.

- 2) Melihat pendirian fasilitas bersama seperti SAMSAT Corner dan SAMSAT Keliling telah terbukti efektif dalam memberikan layanan yang responsif dan meningkatkan penerimaan PKB. Oleh karena itu, diharapkan agar berjebah fasilitas SAMSAT dibuka, terutama di lokasi-lokasi strategis dan terminal kendaraan.
- 3) Diperlukan implementasi langkah mendatangi secara langsung untuk mengakomodasi personal yang belum dapat mengunjungi SAMSAT karena alasan tertentu. Oleh karena itu, UPPD II dapat menjalin kerja sama dengan POS Indonesia agar memungkinkan pengambilan bayar retribusi pajak. Dengan ini, sistem ini akan memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak secara lebih efisien.
- 4) Karena peranan signifikan realisasi pendapatan dari PKB dan BBNKB pada total PAD wilayah Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir sangat kuat, dengan persentase realisasi berkisar antara 103% hingga 105%, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan penerimaan dari PKB dan BBNKB telah menjadi penyumbang terbesar dalam sumber keuangan untuk pemerintah daerah melalui pendapatan PAD. Oleh karena itu, UPPD II diharapkan terus melakukan upaya diseminasi atau personal, untuk menyadarkan akan Urgentnya pembayaran dengan tepat PKB dan BBNKB.
- 5) Diperlukannya kolaborasi dengan pendistribusi kendaran (dealer) dan perusahaan pembiayaan untuk pengumpulan informasi kendaraan. Dealer motor serta perusahaan pembiayaan ditekankan agar menyediakan informasi komprehensif tentang pemilik kendaraan. Sebagai contoh, sistem digital UPPD II memiliki kemampuan untuk mengakses data yang berasal penyedia kendaraan (dealer) atau perusahaan pembiayaan dengan beroperasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendapatkan informasi tentang personal pemilik kendaran. Dengan demikian, kalau personal tidak membayar retribusi pajak, langkah-langkah untuk penelusuran dapat diambil dengan dasar alamat tercatat pada dealer/perusahaan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihsan. 2022. Cara Pembayaran Pajak Kendaraan, Melalui Bank Kalsel Online. Diambil dari: <https://jurnalkalimantan.com/cara-pembayaran-pajak-kendaraan-melalui-bank-kalsel-online> (diakses pada 10 Juni 2022).
- Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Pudyatmoko, Sri. Y. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rizky Hidayat. 2022. Pelayanan "Samsat Bayar Malam" Resmi Dibuka. Diambil dari: <https://abdipersadafm.co.id/2022/01/22/pelayanan-samsat-bayar-malam-resmi-dibuka/> (diakses pada 10 Juni 2022). <https://instagram.com/samsatdigital?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
- Siahaan, Marihot P. 2008. Pajak daerah dan retribusi daerah edisi 1-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. 1997. Perpajakan. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Wardhana, A., Juniar, A., Effendi, M., & Rahmawati, R. (2020). Perception of Lecturers in Banjarmasin Towards Motor Vehicle Tax. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 5(11), 104–114. Wardhana, A., Juniar, A., Effendi, M., & Rahmawati, R. (2020). Perception of Lecturers in Banjarmasin Towards Motor Vehicle Tax. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 5(11), 104–114.